

Hubungan antara Kepemimpinan dan Komunikasi Politik

Ahmad Sampurna Rambe¹, Yohani Putri Dinar², Inayah Sajida³,
Muhammad Sholehuddin Al-Qadri⁴, Muhammad Naufal Habiibii⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ahmadsampurnauinsu@gmail.com¹, yohaniputridinar@gmail.com²,
inayahsajida@gmail.com³, mhdsqodry0311@gmail.com⁴,
muhammadnaufalhabiibii19@gmail.com⁵

Corresponding Author: Ahmad Sampurna Rambe

Abstrak

Penelitian ini membahas hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi politik dalam konteks dinamika politik modern. Kepemimpinan politik tidak hanya terkait dengan kekuasaan, tetapi juga dengan kemampuan untuk mengarahkan masyarakat dan membangun opini publik melalui komunikasi yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman tentang bagaimana komunikasi politik mempengaruhi legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif sangat bergantung pada keterampilan komunikasi, baik melalui media sosial maupun media massa. Pemimpin yang mampu menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan sesuai ekspektasi publik cenderung memperoleh kepercayaan yang lebih tinggi.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Komunikasi Politik, Media Sosial, Pesan.

Abstract

This study discusses the relationship between leadership and political communication in the context of modern political dynamics. Political leadership is not only related to power, but also to the ability to direct society and build public opinion through effective communication. This study uses a descriptive qualitative approach to explore the understanding of how political communication affects the legitimacy and stability of government. The results of the study indicate that effective leadership is highly dependent on communication skills, both through social media and mass media. Leaders who are able to convey messages clearly, consistently, and according to public expectations tend to gain higher trust.

Keywords: Leadership, Political Communication, Social Media, Message.

PENDAHULUAN

Dalam dinamika kehidupan politik modern, kepemimpinan dan komunikasi politik merupakan dua komponen yang tak dapat dipisahkan. Kepemimpinan bukan sekadar persoalan posisi atau kekuasaan, melainkan juga kemampuan untuk membangun pengaruh, membentuk opini publik, dan mengarahkan masyarakat menuju visi kolektif (Assingkily & Mesiono, 2019). Di sisi lain, komunikasi politik menjadi medium utama yang menjembatani pemimpin dengan masyarakat, menciptakan ruang diskursif yang memengaruhi cara publik memahami realitas sosial dan arah kebijakan. Dalam konteks inilah, keterkaitan antara kepemimpinan dan komunikasi politik menjadi semakin penting untuk dikaji, terutama di era digital yang ditandai dengan arus informasi yang cepat dan tak terbendung (Fajar, 2022).

Seorang pemimpin politik tidak lagi cukup hanya memiliki karisma dan visi, tetapi juga harus mampu mengomunikasikan gagasan dan kebijakan secara efektif kepada berbagai lapisan masyarakat. Retorika, narasi, simbol, bahkan gaya komunikasi yang digunakan seorang pemimpin dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam membangun kepercayaan publik (Slamet, 2023).

Komunikasi politik menjadi alat utama dalam membentuk citra, memobilisasi dukungan, serta menyampaikan program-program kerja yang diusung. Di sinilah letak pentingnya pemahaman mendalam mengenai bagaimana pola komunikasi politik yang diterapkan oleh seorang pemimpin dapat memperkuat atau justru melemahkan legitimasinya di mata rakyat.

Fenomena politik kontemporer di berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi politik seorang pemimpin dapat berdampak langsung terhadap stabilitas pemerintahan dan tingkat partisipasi politik masyarakat. Pemimpin yang mampu merespons aspirasi rakyat dengan bahasa yang komunikatif dan empatik cenderung mendapatkan dukungan lebih luas, sementara pemimpin yang gagal membangun komunikasi yang sehat sering kali kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tantangan politik yang signifikan.

Oleh karena itu, studi mengenai hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi politik tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga krusial secara praktis untuk memahami kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan (Mufidah, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menggali makna, persepsi, serta dinamika hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi politik. Hubungan antara kedua elemen ini mengandung aspek-aspek subjektif seperti gaya komunikasi, citra publik, strategi membangun kepercayaan, hingga penggunaan simbol politik, yang membutuhkan pengamatan mendalam untuk dipahami.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia, bukan pada penghitungan angka atau statistik. Pendekatan ini bertujuan menggali makna, menelusuri proses, serta memahami pola-pola yang terjadi dalam kehidupan sosial melalui sudut pandang orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan karakteristiknya yang fleksibel, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa, emosi, dan konteks yang kompleks, yang sering kali tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi dan studi pustaka, ditemukan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam konteks politik sangat bergantung pada keterampilan komunikasi yang baik. Para pemimpin yang mampu

menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan sesuai dengan ekspektasi publik cenderung mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat.

Selain itu, penggunaan media sosial dan media massa konvensional secara strategis terbukti memperkuat hubungan antara pemimpin dan konstituen. Dalam konteks ini, komunikasi politik berfungsi tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun citra, mengelola krisis, serta membentuk persepsi publik terhadap kebijakan dan kepribadian pemimpin.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gaya komunikasi sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dianut. Pemimpin dengan gaya transformasional cenderung mengadopsi pola komunikasi yang inspiratif dan persuasif, berfokus pada membangun hubungan emosional dengan audiens. Sebaliknya, pemimpin dengan gaya transaksional lebih banyak menggunakan komunikasi yang berbasis instruksi dan penawaran timbal balik. Selain itu, terdapat pula temuan bahwa budaya politik lokal mempengaruhi bagaimana komunikasi politik dijalankan; dalam budaya politik yang paternalistik, misalnya, komunikasi cenderung bersifat top-down dan lebih bersifat simbolik daripada dialogis.

Tokoh-tokoh politik yang berhasil mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan perubahan lingkungan sosial dan teknologi. Mereka tidak hanya mengandalkan pidato formal, tetapi juga membangun kedekatan dengan rakyat melalui media sosial, penggunaan bahasa sehari-hari, serta membingkai narasi politik yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Faktor kepercayaan publik sangat berkorelasi positif dengan kejelasan, ketulusan, dan konsistensi komunikasi politik yang dilakukan oleh pemimpin.

Pembahasan

Konsep Kepemimpinan dalam Komunikasi Politik

Kepemimpinan dalam komunikasi politik mencerminkan kemampuan seorang aktor politik untuk mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi masyarakat melalui strategi komunikasi yang terencana dan efektif. Dalam dunia politik modern, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan aspek pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan, tetapi juga erat kaitannya dengan kemampuan mengelola persepsi publik (Alfiansyah, et.al., 2020). Seorang pemimpin politik dituntut untuk menjadi komunikator utama yang mampu menyampaikan visi, misi, nilai, dan program-programnya secara efektif kepada masyarakat (Basyir, 2019).

Selain itu, kepemimpinan dalam komunikasi politik diukur dari sejauh mana seorang pemimpin mampu membangun hubungan emosional yang kuat dengan rakyat. Kedekatan emosional ini dapat dibentuk melalui pesan-pesan politik yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana, personal, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemimpin yang berhasil membangun keterikatan emosional akan lebih mudah mendapatkan loyalitas serta dukungan politik dari publik. Komunikasi yang berhasil bukan hanya tentang menyampaikan informasi, melainkan juga tentang menciptakan rasa memiliki di antara masyarakat terhadap agenda-agenda yang diusung oleh pemimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif menuntut sensitivitas tinggi

terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya audiens yang menjadi sasaran komunikasi (Irawan & Putra, 2019).

Dalam konteks komunikasi politik, pemilihan saluran komunikasi menjadi faktor strategis. Seorang pemimpin harus cermat dalam memilih media yang paling sesuai untuk menjangkau publik, baik melalui media konvensional seperti televisi, surat kabar, dan radio, maupun media baru seperti media sosial. Perkembangan teknologi informasi menuntut pemimpin untuk lebih adaptif dalam menggunakan berbagai platform komunikasi untuk menyampaikan pesannya (Hasan, 2021). Keterampilan dalam menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakteristik masing-masing media menjadi kunci dalam membangun efektivitas komunikasi politik. Ketepatan dalam menentukan media, gaya bahasa, serta waktu penyampaian pesan akan sangat menentukan seberapa besar dampak yang dihasilkan dari komunikasi politik yang dilakukan.

Tanpa kemampuan komunikasi politik yang mumpuni, seorang pemimpin berisiko kehilangan legitimasi di mata publik. Kegagalan dalam mengartikulasikan visi, kurangnya kejelasan dalam penyampaian pesan, atau ketidakmampuan dalam membangun hubungan emosional dengan masyarakat dapat berujung pada melemahnya kepercayaan publik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada instabilitas politik dan menurunnya efektivitas pemerintahan. Oleh sebab itu, komunikasi politik bukan sekadar pelengkap dalam praktik kepemimpinan, melainkan merupakan salah satu pilar utama yang menopang keberhasilan seorang pemimpin dalam membangun, mempertahankan, dan mengembangkan kekuasaan politik secara berkelanjutan (Amin, 2020).

Teori yang Mendasari Hubungan Kepemimpinan dan Komunikasi Politik

Hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi politik dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama yang menyoroti peran penting komunikasi dalam membangun pengaruh politik. Salah satu teori yang relevan adalah *Uses and Gratifications Theory*, yang menyatakan bahwa masyarakat secara aktif memilih media dan pesan-pesan politik berdasarkan kebutuhan, motivasi, dan harapan mereka. Teori ini menekankan bahwa publik bukanlah penerima pasif dari informasi, melainkan pihak yang aktif mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti kebutuhan akan informasi, hiburan, identitas sosial, atau interaksi sosial (Darmawan, 2021).

Dalam konteks ini, pemimpin politik harus mampu memahami preferensi audiensnya dan menyesuaikan strategi komunikasinya agar pesan yang disampaikan tidak hanya sampai, tetapi juga diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Kegagalan dalam memahami kebutuhan audiens dapat menyebabkan pesan politik diabaikan atau bahkan ditolak, sehingga mempengaruhi efektivitas kepemimpinan itu sendiri.

Selain *Uses and Gratifications*, teori Agenda Setting juga sangat berperan dalam menjelaskan dinamika hubungan ini. Teori ini mengungkapkan bahwa media, atas arahan atau pengaruh pemimpin politik, dapat menetapkan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Artinya, pemimpin dapat membentuk agenda publik melalui

komunikasi yang terarah, memilih isu yang diangkat, serta membungkai narasi tertentu untuk mempengaruhi opini massa (Gunawan, 2020).

Sementara itu, teori *Transformational Leadership* menambahkan dimensi lain dalam memahami hubungan ini, yaitu bahwa pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu membangkitkan semangat, menginspirasi perubahan, dan membangun hubungan emosional yang kuat dengan pengikutnya. Dalam kerangka ini, komunikasi politik menjadi sarana untuk menyampaikan visi, nilai-nilai, dan tujuan bersama dengan cara yang persuasif dan inspiratif (Teguh, 2019).

Oleh karena itu, komunikasi yang efektif yang mengandung visi yang jelas, nilai-nilai luhur, serta daya tarik emosional bukan hanya mendukung keberhasilan kepemimpinan, tetapi juga membentuk loyalitas, komitmen, dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat terhadap pemimpinnya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kepemimpinan dan Komunikasi Politik

Hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal yang membentuk bagaimana pesan-pesan politik dikomunikasikan dan diterima oleh masyarakat. Salah satu faktor utama adalah budaya politik yang berlaku di suatu negara atau komunitas. Dalam budaya politik paternalistik, komunikasi politik cenderung bersifat satu arah, di mana pemimpin dianggap sebagai figur otoritatif yang tidak banyak membuka ruang dialog dengan rakyat, melainkan mengedepankan simbolisme dan perintah (Jumadi, 2019).

Sebaliknya, dalam budaya politik demokratis, komunikasi antara pemimpin dan masyarakat berlangsung secara dialogis, partisipatif, dan menghargai perbedaan pendapat. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi, terutama kehadiran media sosial, telah menjadi faktor disruptif yang mengubah wajah komunikasi politik modern.

Pemimpin saat ini dituntut untuk mampu berinteraksi secara lebih cepat, lebih personal, dan lebih transparan dengan publik melalui berbagai platform digital. Media sosial juga memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik secara instan, sehingga pemimpin harus lebih responsif dalam mengelola komunikasi politik mereka (Mulyani, 2023).

Di sisi lain, faktor-faktor seperti tingkat kepercayaan publik, kredibilitas pribadi pemimpin, serta sensitivitas terhadap isu-isu sosial juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan hubungan komunikasi politik dan kepemimpinan. Kepercayaan adalah fondasi utama yang menopang efektivitas komunikasi politik; tanpa kepercayaan, pesan-pesan politik cenderung diabaikan atau bahkan dicurigai. Kredibilitas seorang pemimpin dibangun melalui konsistensi antara kata dan tindakan, serta rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. (Dewi & Kusuma, 2020).

Selain itu, tingkat sensitivitas pemimpin terhadap berbagai dinamika sosial seperti ketidakadilan, krisis ekonomi, atau perubahan nilai-nilai sosial menentukan seberapa relevan dan diterimanya komunikasi politik yang disampaikan. Lingkungan politik juga turut berpengaruh: dalam kondisi stabil, pemimpin lebih leluasa membangun komunikasi jangka panjang yang strategis, sedangkan dalam situasi

krisis atau ketidakpastian politik, pemimpin harus mengadopsi komunikasi yang lebih adaptif, persuasif, dan menenangkan untuk menjaga kepercayaan serta kestabilan publik.

Implikasi Hubungan Kepemimpinan dengan Komunikasi Politik terhadap Demokrasi

Hubungan yang erat antara kepemimpinan dan komunikasi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas demokrasi di suatu negara. Komunikasi politik yang terbuka, jujur, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan inklusif. Ketika pemimpin mampu berkomunikasi secara transparan dan mengundang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, maka tingkat partisipasi politik akan meningkat (Kusumawati, 2020).

Masyarakat merasa lebih dihargai dan terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Pemimpin yang komunikatif dengan masyarakat cenderung membangun hubungan saling percaya, yang menjadi dasar utama dari legitimasi politik. Melalui komunikasi yang baik, masyarakat bisa lebih memahami kebijakan, serta memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, sehingga tercipta proses demokrasi yang lebih partisipatif.

Sebaliknya, komunikasi politik yang manipulatif, penuh disinformasi, atau didominasi oleh propaganda dapat membawa dampak merugikan bagi demokrasi itu sendiri. Komunikasi semacam ini dapat memperburuk polarisasi sosial, memecah belah masyarakat, dan menurunkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik. Ketika pesan yang disampaikan hanya bertujuan untuk memanipulasi opini publik atau menjaga kekuasaan, maka proses demokrasi yang sejati akan terdistorsi (Savitri, 2019).

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemimpin untuk memperkuat kapasitas komunikasi politik yang etis dan profesional. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat dalam mengelola kekuasaan, tetapi juga pemimpin yang mampu membangun komunikasi yang adil, inklusif, dan memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi yang baik adalah prasyarat untuk memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat (Prasetyo, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi politik memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas pemerintahan dan kualitas demokrasi. Komunikasi politik bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun pengaruh, memperkuat legitimasi, serta membentuk persepsi publik terhadap kebijakan dan pemimpin. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik, terbuka, dan transparan cenderung mendapatkan kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas politik dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif.

Penting bagi pemimpin untuk menyesuaikan gaya komunikasi mereka dengan kebutuhan dan ekspektasi publik, serta dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, lebih personal, dan lebih langsung melalui media sosial. Selain itu, pemimpin harus peka terhadap kondisi sosial dan politik, serta membangun hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat untuk menciptakan iklim politik yang inklusif dan partisipatif. Dengan komunikasi yang etis dan profesional, pemimpin dapat memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Sebagai hasilnya, kepemimpinan yang didukung oleh komunikasi politik yang efektif akan memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, M., Assingkily, M. S., & Prastowo, A. (2020). Kebijakan Internal Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, 11(1), 52-67. <https://www.academia.edu/download/105809027/3192.pdf>.
- Amin, M. (2020). *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik dalam Kontestasi Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Assingkily, M. S., & Mesiono, M. (2019). Karakteristik Kepemimpinan Transformasional di Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta Relevansinya dengan Visi Pendidikan Abad 21. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 147-168. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/manageria/article/view/2475>.
- Basyir, M. (2019). *Kepemimpinan Politik di Era Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darmawan, A. (2021). *Kepemimpinan dan Komunikasi: Teori dan Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, I. & Kusuma, R. (2020). "Peran Kepemimpinan dalam Komunikasi Politik: Studi Kasus Pemimpin Daerah di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 8 No. 2.
- Fajar, M. (2022). *Pemikiran dan Praktik Kepemimpinan dalam Demokrasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Gunawan, D. (2020). *Teori Komunikasi Politik*. Malang: Universitas Malang Press.
- Hasan, A. (2021). "Kepemimpinan Transformasional dalam Komunikasi Politik." *Jurnal Kepemimpinan Politik*. Vol. 4 No. 3.
- Irawan, R. & Putra, E. (2019). "Strategi Komunikasi Politik dalam Membangun Legitimasi Pemimpin." *Jurnal Studi Komunikasi*. Vol. 7 No. 4.
- Jumadi, M. (2019). "Komunikasi Politik di Era Digital: Peran Pemimpin dalam Menjaga Hubungan dengan Publik." *Jurnal Komunikasi Massa*. Vol. 10 No. 2.
- Kusumawati, S. (2020). "Komunikasi Politik dan Kepemimpinan: Implikasi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat." *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*. Vol. 9 No. 3.
- Mufidah, A. (2019). *Pengantar Teori Kepemimpinan Politik*. Jakarta: Kencana.
- Mulyani, A. (2023). "Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Politik dalam Pencapaian Tujuan Pemerintahan." *Jurnal Administrasi Negara*. Vol. 5 No. 2.
- Prasetyo, T. (2018). "Pemimpin Politik dan Komunikasi Massa: Pengaruh terhadap Pembentukan Citra Publik." *Jurnal Komunikasi dan Politik*. Vol. 11 No. 3.
- Savitri, N. (2019). "Komunikasi Politik dan Pengaruhnya terhadap Kepemimpinan Negara Demokratis." *Jurnal Politik dan Masyarakat*, Vol. 8 No. 4.
- Slamet, K. (2023). *Komunikasi Politik: Perspektif dan Implementasi dalam Dunia Politik*. Jakarta: Rajawali Press.



Teguh, A. (2019). *Komunikasi Politik dalam Demokrasi: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Andi Offset.